



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency



PERAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) DALAM MEWUJUDKAN KONDISI KESELAMATAN, KEAMANAN NUKLIR DI INDONESIA





DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGANUKLIRAN (UU & Keppres)

- Pembukaan UUD 1945
- UU No.8 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir.
- UU No. 9 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone
- **UU No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran**
- UU No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir
- UU No. 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism.
- Keppres No.81 Tahun 1993 Ttg Pengesahan Convention on Early Notification of Nuclear Accident
- Keppres No. 82 Th 1993 Ttg Pengesahan Convention on Assistance In The Case of A Nuclear Accident or Radiological Emergency
- **Keppres No.106 Th 2001 Ttg Pengesahan Convention On Nuclear Safety**
- Perpres No 46 Th 2006 Ttg Pengesahan Convention on Physical Protection of Nuclear Material
- Perpres No.84 Tahun 2010 Ttg Pengesahan joint convention on the safety of fuel Management and The safety of Spent Fuel Management
- Perpres No.74 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir



**MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA
DAN SELURUH
TUMPAH DARAH**

**DARI
BAHAYA
RADIASI**

**AMANAH
PEMBUKAAN UUD
1945**

**IKUT SERTA
MEWUJUDKAN
PERDAMAIAN DUNIA**

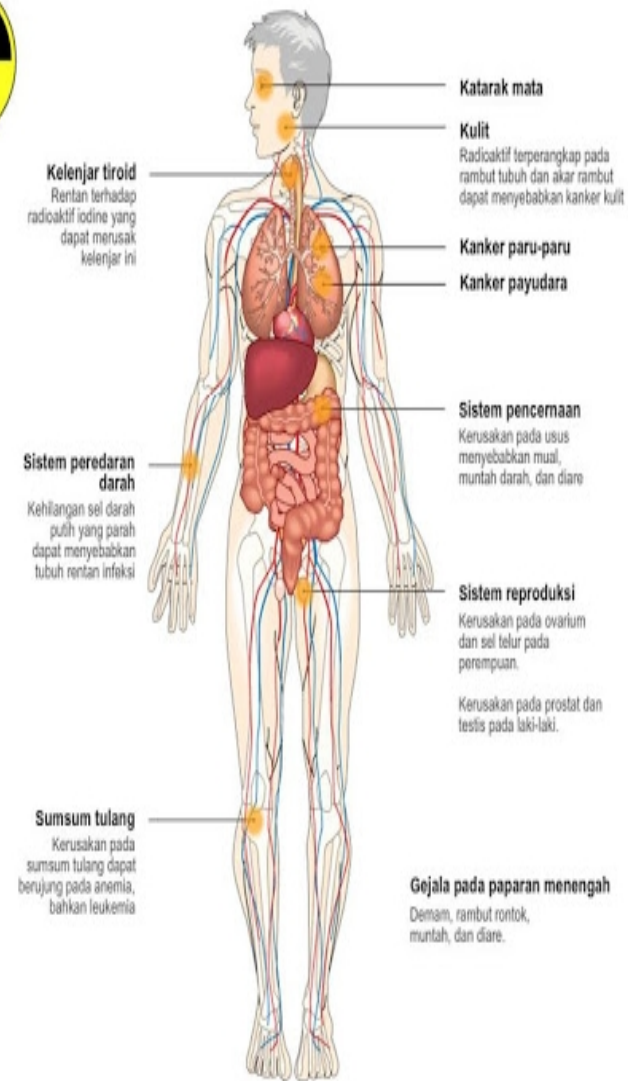
DLM BID. NUKLIR

Nawacita-1 :

Kami akan menghadirkan kembali Negara utk melindungi segenap bangsa & memberikan rasa aman bagi seluruh warga.

Misi BAPETEN :

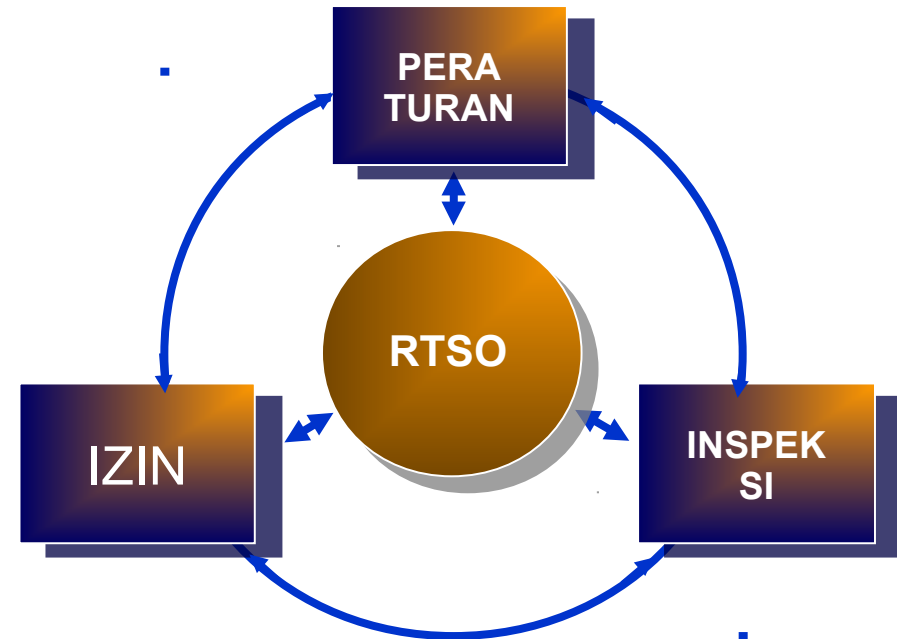
Melindungi pasien, pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi yang dapat ditimbulkan oleh setiap kegiatan ketenaganukliran di Indonesia.





AMANAHA UU No 10 TH 1997 TTG KETENAGANUKLIRAN

- Pasal 14 Pengawasan Ketenaganukliran dilakukan melalui:
 1. Penyusunan **Peraturan**,
 2. Penyelenggaraan **Perijinan**,
 3. Pelaksanaan **Inspeksi**
& **penegakan hukum**



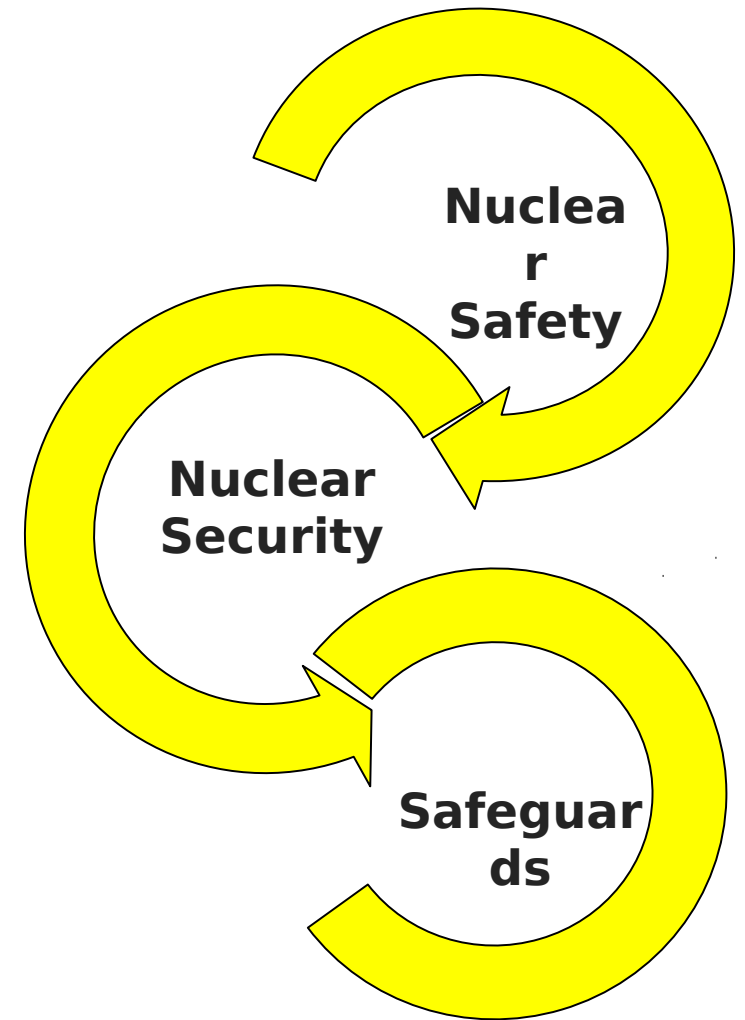
Berdasarkan standar pengawasan dunia, maka untuk meningkatkan kualitas hasil kegiatan ketiga pilar utama pengawasan perlu dilakukan kegiatan Teknis Pengkajian Keselamatan Nuklir, Kegiatan Kesiapsiagaan Nuklir dan Keteknikan yang biasa disebut dengan **Regulatory Technical Support Organization (RTSO)**.



Pasal 15 UU No.10 Tahun 1997

Tujuan Pengawasan Ketenaganukliran

- a. Terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
- b. Menjamin adanya perlindungan dari aspek keselamatan dan kesehatan terhadap para pekerja dan anggota masyarakat dan lingkungan hidup;
- c. Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
- d. Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menumbuhkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
- e. Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan
- f. Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.





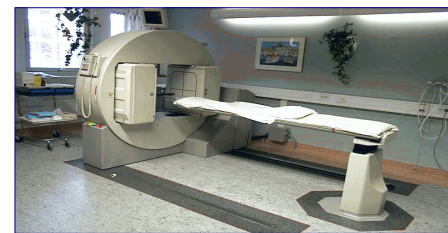
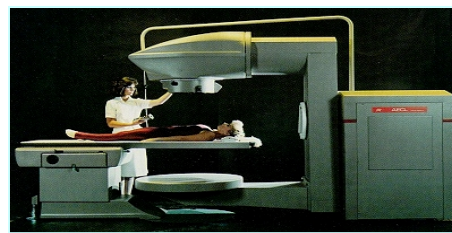
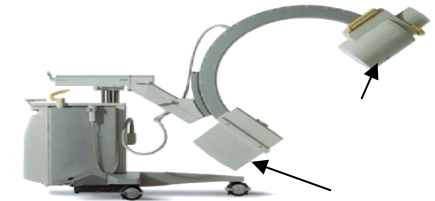
OBJEK PENGAWASAN KETENAGANUKLIRAN & TANTANGANNYA





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

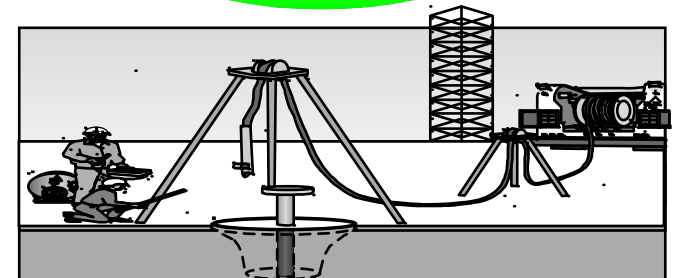
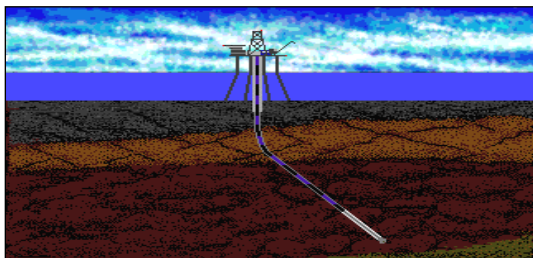
Nuclear Energy Regulatory Agency





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency





Pengawasan Instalasi & Bahan Nuklir (Reaktor Nuklir)

Reaktor Riset (BATAN)

- a. TRIGA Mark Reactor (2MW) in Bandung, MBA RI-A
- b. Kartini Reactor (250 kW) in Jogjakarta, MBA RI-B
- c. Multipurpose Reactor - GA Siwabessy (30 MW) in Serpong, MBA RI-C
- d. Reaktor Daya Eksperimental (RDE)
Akan dibangun oleh BATAN di Serpong. Baru dalam proses evaluasi
ijin tapak reaktor.



Reaktor Riset Bandung



Reaktor Riset Serpong



Reaktor Riset Yogya



PENGAWASAN INSTALASI NUKLIR NON REAKTOR

- a. **Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) Serpong, MBA RI-D**
- b. **Instalasi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE) Serpong, MBA RI-E**
 - **Pemisahan uranium dan thorium dari monasite**
 - **Produksi uranium dari yellow cake**
- c. **Instalasi Radiometalurgy Serpong, MBA RI-F**
 - **Hot cell, capability for dismantling, cutting, dissolving, extraction**
- d. **KHIPSB3 (Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas) Serpong, MBA RI-G**
- e. **Instalasi Pengolahan Limbah radioaktif , Serpong**





PENGAWASAN KETENAGANUKLIRAN DI LUAR PEMEGANG IJIN (OUT OF REGULATORY CONTROL)



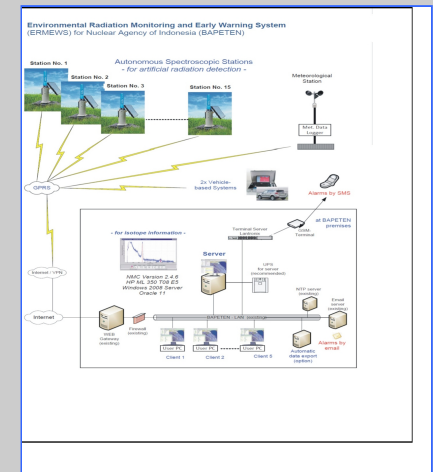
**PENGAWASAN
NORM DAN
TENORM**

**ORPHAN
SOURCE**



**ILLICIT
TRAFICKING
SUMBER
RADIASI**

**MONITORING
RADIASI
LINGKUNGAN**





PERATURAN KETENAGANUKLIRAN

UU

- UU NO.8 TH 1978
- UU NO.9 TH 1997
- UU NO.10 TH 1997
- UU NO. 1 TH 2012
- UU NO. 10 TH 2014

KEPPRES & PP

- 9 PP
- 8 KEPPRES/
PERPRES

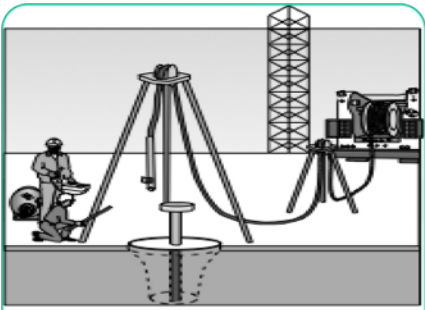
PERKA BAPETEN

- 50 PERKA
NUCLEAR
SAFETY
- 27 PERKA
RADIATION
SAFETY
- 2 PERKA
SAFEGUARDS
- 1 PERKA
KEAMANAN
NUKLIR

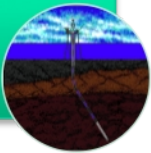




PERIJINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BIDANG INDUSTRI & KESEHATAN



WELL LOGGING



GAUGING PABRIK KERTAS



RADIOGRAFI



PEMERIKSAAN ZRA DI PIPA GAS



VERIFIKASI IJIN DI SCHLUMBERGER



VERIFIKASI IJIN BRANCHITERAPI

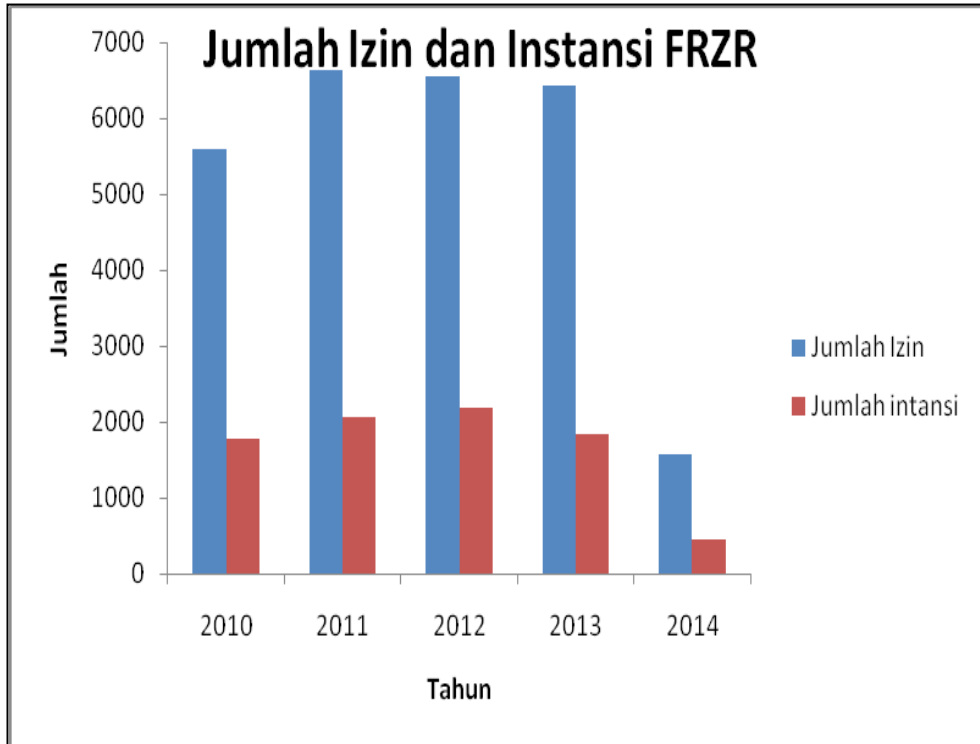


LLLLL



LLLLLLL





PERIJINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Instalasi Nuklir

- Reaktor Riset
- Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset**
- Instalasi Elemen Bakar Eksperimental**
- Instalasi Radiometalurgy**
- Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas
- Instalasi Pengolahan Limbah radioaktif
- Instalasi radioisotop**

Fasilitas Kesehatan

- Radiodiagnostik
- Radioterapi
- Kedokteran Nuklir

Fasilitas Industri

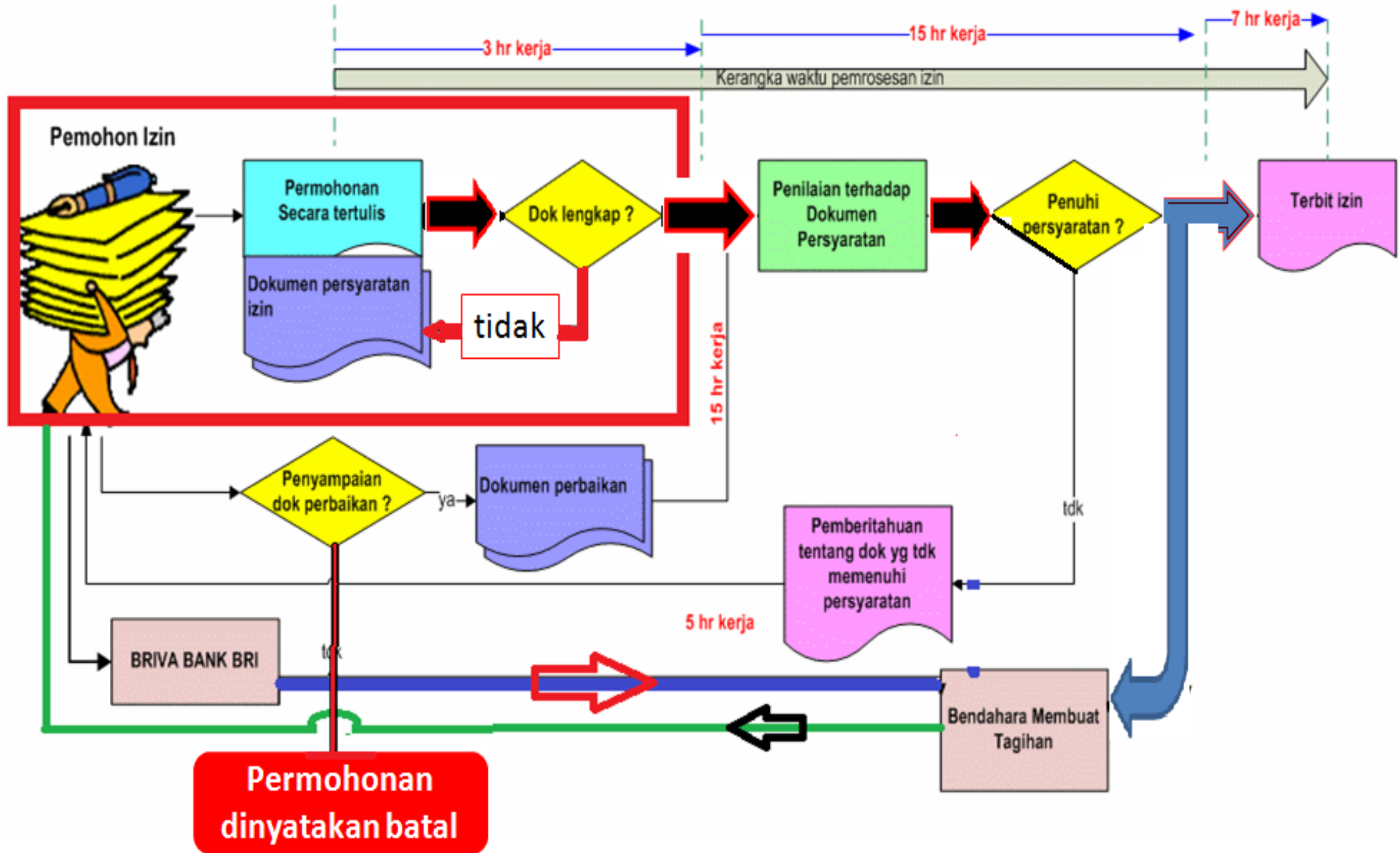
- Gauging
- Logging

Fasilitas Penelitian & Pendidikan

PENUNJUKAN LAB.UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR –X RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL : 15 LEMBAGA UJI KESESUAIAN.



FLOW PERMOHONAN DAN PENERBITAN FRZR





BAPETEN Licensing and Inspection System (B@LIS)

www.bapeten.net/pengawasan2009/index.php?modul=perizinan&menu=khusus

B@LIS BAPETEN Licensing and Inspection System (ver. 1.5)

Proses Izin Pengaturan Modul Home Logout

S P I Izin Tagihan Izin (PP 134) Proses Khusus (Edit, Delete Nomor SPI/izin)

Proses Khusus

Cari dan Pilih Instansi

1. Yayasan Santo Georgius (2546) Jl. Gereja No.13 Pringsewu, Pringsewu 35373, Lampung, Telp. (0729) 21011, Fax. (0729) 21701

No.	No. Registrasi	Tgl/No. Surat Permohonan	Tgl Registrasi	Disposisi
1.	00859.13 (ID:32969)	011/Y.St.G/Peng-I/2013/2013-01-21	2013-02-11	thamid

No.	No. Evaluasi	Kegiatan	Jumlah	Harga	Jum. Harga	Status Tagihan
1.	00859.13/04/21/134P/II/13 (PraRegID:37821)	Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional - Pesawat Sinar-X Diagnostik terpasang tetap untuk pemeriksaan umum - Pembangkit Radiasi Pengion - Perpanjangan	1	591.000	591.000	sdh ditagih (bim dibayar)

No.	No. SPI	Sumber	No. Izin	History
1	00859.13/04/21/134P/001/II/13 (stat_akhir:3)	Shimadzu (ID:017489) Tipe : 1/2 P13 DK-80 S No.Seri: 26360	017489.1.204.02000.260413	Registrasi (1) oleh a.fadillah (11-02-2013 (11:53)) Cek Kelengkapan (2) oleh e.sapto (12-02-2013 (11:43)) Penilaian (3) oleh thamid (24-04-2013 (09:14)) Persetujuan Penilaian (4) oleh zainal (25-04-2013 (15:03)) Entry Data Izin (5) oleh henda (26-04-2013 (11:01)) Data Izin Lengkap (6) oleh henda (26-04-2013 (11:21)) Persetujuan Terbit (7) oleh thamid (26-04-2013 (13:52)) Cetak Izin (8) oleh henda (26-04-2013 (14:19))

B@LIS Perizinan, meliputi :

- Proses Registrasi
- Proses Cek Kelengkapan
- Proses Penilaian
- Proses Persetujuan penilaian
- Proses Penerbitan
- Proses Persetujuan penerbitan
- Proses Cetak izin
- Proses Pengiriman izin

B@LIS PERSETUJUAN ONLINE, meliputi :

- Ekspor Impor Re-ekspor Online
- Pegangkutan Online
- Negative Statement Online
- Penetapan Penghentian Online

Pembayaran Permohonan izin dan penerbitan ketetapan secara Realtime Online

data izin tahun 2011xlsx bergerak-ato-tidak.jpg Gambar-gambar yan...jpg KTUN_Persetujuan_1...pdf KTUN_Persetujuan_1...pdf Tampilkan semua unduhan...

16:04 24/07/2013



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

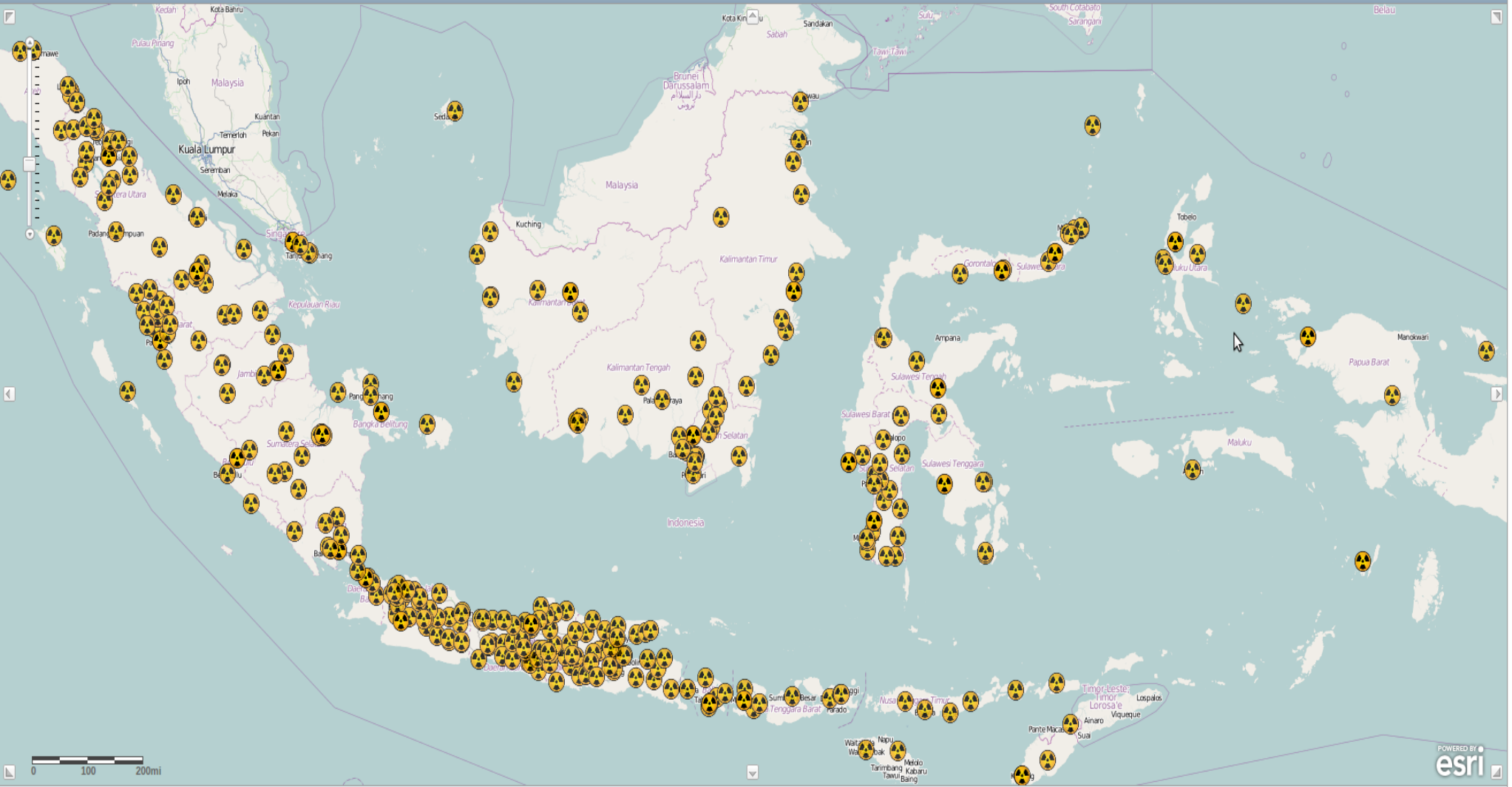


maps.ina-sdi.or.id/home/webmap/templates/HeaderFooter/chrome/index.html?appid=f49370e68ad3417ea3cd5303cf6f0c4&webmap=96a96ec304bb4950b99ff59603932f59

Yahoo

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 2012



POWERED BY
esri

A map from: bapeten



Kedokteran Nuklir Radioaktif dari Serpong ke Seluruh Penjuru Rumah Sakit

Produksi Multipurpose Reactor - GA Siwabessy (30 MW) in Serpong

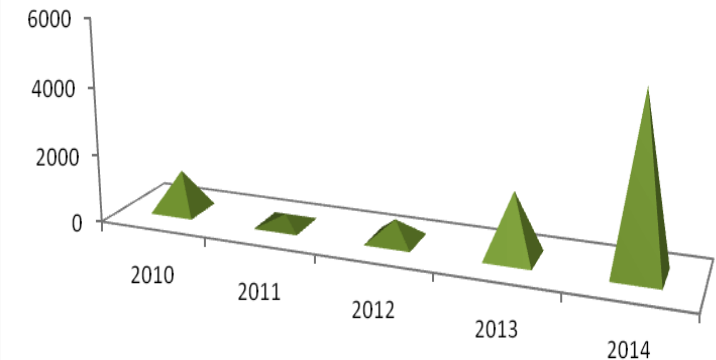




PERIJINAN DAN PENUNJUKAN PEKERJA DALAM BIDANG KETENAGANUKLIRAN

- OPERATOR & SUPERVISOR REAKTOR NUKLIR
- PETUGAS PERAWATAN INSTALASI NUKLIR
- PETUGAS INVENTORY BAHAN NUKLIR
- PETUGAS PROTEKSI RADIASI
 1. PPR Kesehatan tk-1, 2, 3
 2. PPR Industri Tk 1, 2
- TENAGA AHLI UJI KESESUAIAN X-Ray
- TENAGA TESTER UJI KESESUAIAN X-RAY

Jumlah Penerbitan SIB, FRZR dan IBN





INSPEKSI KESELAMATAN & KEAMANAN NUKLIR



**INSPEKSI KESELAMATAN &
INSTALASI NUKLIR : 27 X / TH**



**INSPEKSI KESELAMATAN
FASILITAS KESEHATAN &
INDUSTRI : 559 X / TH**



**INSPEKSI SAFEGUARDS &
PROTEKSI FISIK : 35 X / TH**

Inspeksi untuk memastikan kepatuhan pengguna thdp peraturan / ketentuan keselamatan sesuai dgn izin yg diberikan



PENEGAKAN HUKUM

- Peringatan tertulis (**Written warnings**)
UU Nomor 10 Tahun 1997 tidak memberikan wewenang kepada Bapeten untuk menjatuhkan denda
- Hukuman denda (**finest or monetary penalties**)
- Modifikasi, pembekuan, atau pencabutan izin (**modification, suspension or revocation of the authorization**)
- Penuntutan dan hukuman pidana (**prosecution and criminal penalties**)



Enforcement Actions

Peringatan tertulis dan **pembekuan izin** merupakan tindakan yang paling sering dilakukan

- Pembekuan izin reaktor triga bandung
- Pembekuan izin PT. INUKI (PT. BATEK)
- peringatan dan pembekuan untuk sebagian besar fasilitas kesehatan



Penegakan Hukum Pidana

Fasilitas Kesehatan:

- Surabaya (2 fasilitas)
- Jakarta (2 fasilitas)
- Batam (1 fasilitas)

Fasilitas Industri:

- Surabaya (1 fasilitas)
- Kota Depok (1 fasilitas)
- Medan (2 fasilitas)

Hukuman:
Pidana denda
subsider pidana
kurungan

Investigasi Inspektur Bapeten bersama dengan Tim Polda Sumut



Inspektur Bapeten menjadi saksi dalam sidang di PN Surabaya



**MENCEGAH TERJADINYA
PENCURIAN ATAU
PEMINDAHAN TIDAK SYAH
BAHAN NUKLIR DAN ZAT
RADIOAKTIF**

**MENCEGAH SABOTASE
PADA EVENT PENTING DAN
DALAM PENGANGKUTAN
BAHAN NUKLIR ATAU
BAHAN RADIOAKTIF**

KEAMANAN NUKLIR

**PENCEGAHAN ILLICIT
TRAFICKING BAHAN NUKLIR/
ZRA MELALUI PEMANTAUAN
JALUR MASUK WILAYAH
INDONESIA**

**KEWASPADAAN THDP
ANCAMAN TERORISME
NUKLIR**



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency





KTT "NUCLEAR SECURITY SUMMIT" USA – 2010, KORSEL – 2012, BELANDA 2014, USA-2016

PEMERINTAH RI
BERKOMITMEN IKUT
SERTA MEWUJUDKAN
KEAMANAN NUKLIR
DUNIA

MENYIAPKAN
NUCLEAR
LEGISLATION
IMPLEMENTATION KIT
ATAU MODEL
LEGISLASI

MENYIAPKAN UNDANG
UNDANG KEAMANAN
NUKLIR NASIONAL

KOORDINASI
NASIONAL UTK
MEWUJUDKAN PUSAT
UNGGULAN KEAMA
NAN NUKLIR MELALUI
I-CoNSEP.



KESIAPSIAGAAN NUKLIR

menyiapkan segala sesuatu utkantisipasi terjadinya kecelakaan nuklir

Kondisi Kecelakaan BAPETEN berperan sbg pengawas dlm kegiatan penanggulangan

Koordinator penanggulangan jika terjadi penemuan *orphan source* dan lepasan ZRA lintas batas negara

Koordinator dlm pengembangan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional

National Contact Point IAEA dlm kecelakaan Nuklir





LINGKUP EMERGENCY PREPAREDNESS & RESPONSE



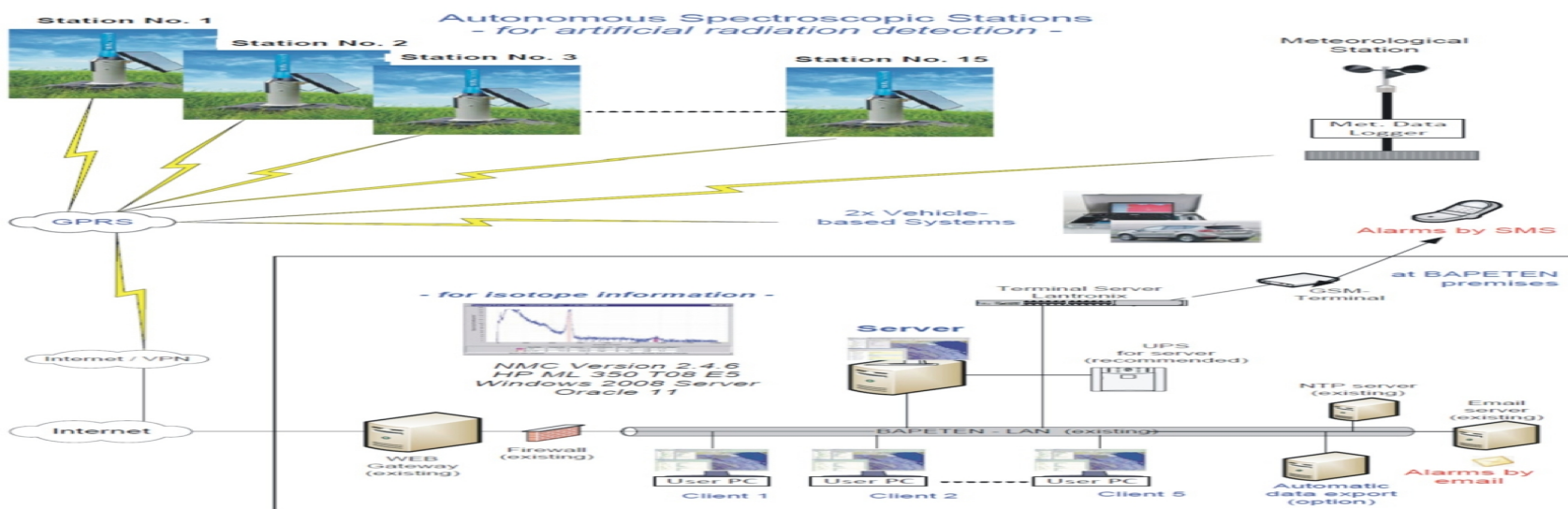
Source Search & Recovery; Radiation Survey;
Environmental Sampling and Analysis;
Radiological Assessment and Advice;



**Medical Support; Dose Assessment;
Decontamination; and
Nuclear Installation Assessment and Advice**



Environmental Radiation Monitoring and Early Warning System (ERMEWS) for Nuclear Agency of Indonesia (BAPETEN)

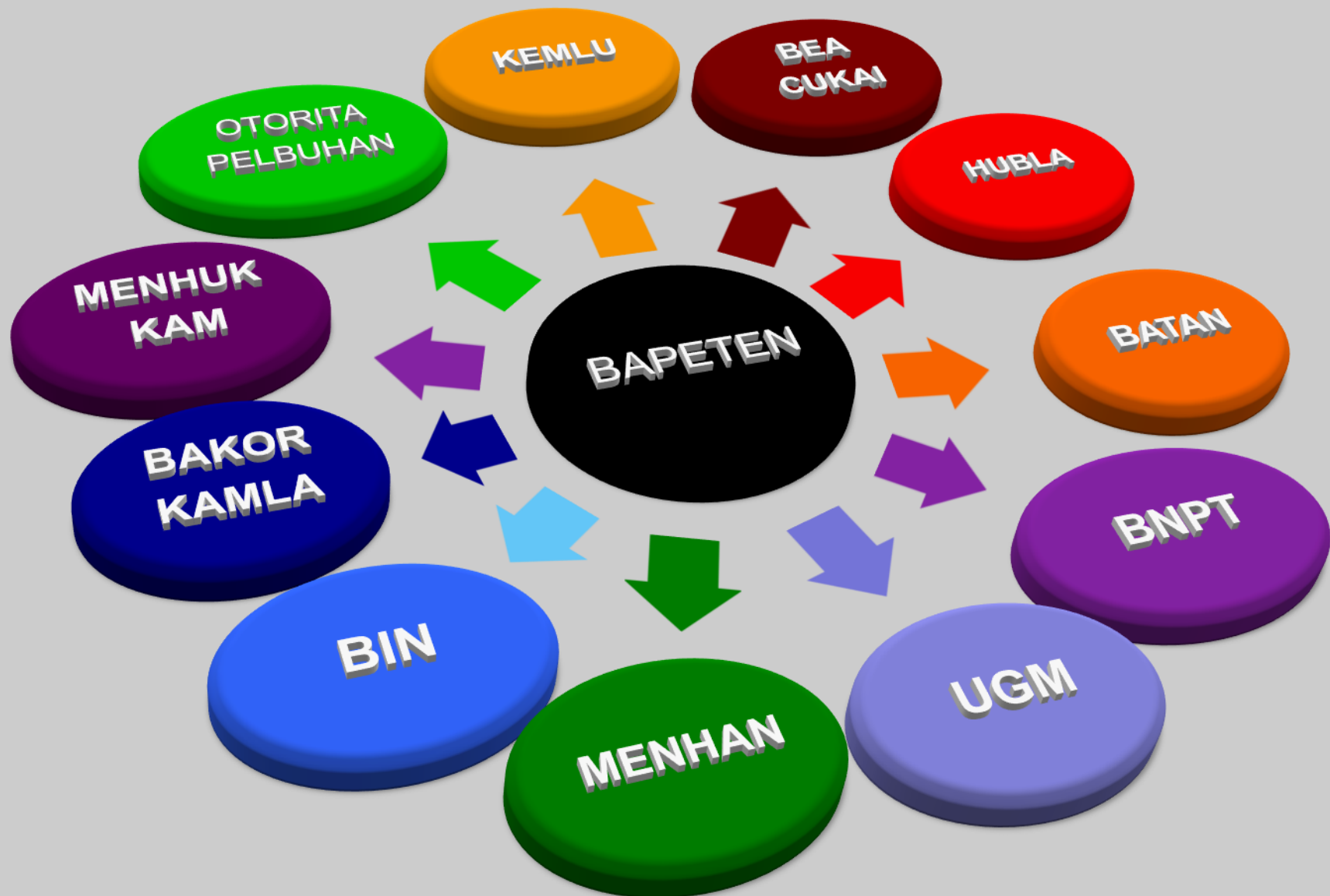


ENVIRONMENTAL RADIATION MONITORING & EARLY WARNING SYSTEM

INDONESIA CENTER OF EXCELLENCE FOR NUCLEAR SECURITY AND EMERGENCY PREPAREDNESS (I-CoNSEP)



KOORDINASI NASIONAL KEAMANAN NUKLIR





KOORDINASI NASIONAL KESIAPSIAGAAN NUKLIR

BNPB

BAPETEN

BATAN

POLRI

KEMENTAN

KEMEN
KESEHATAN

PEMDA

BMKG

BPOM

KKP

BAKOR
KAMLA

BIN

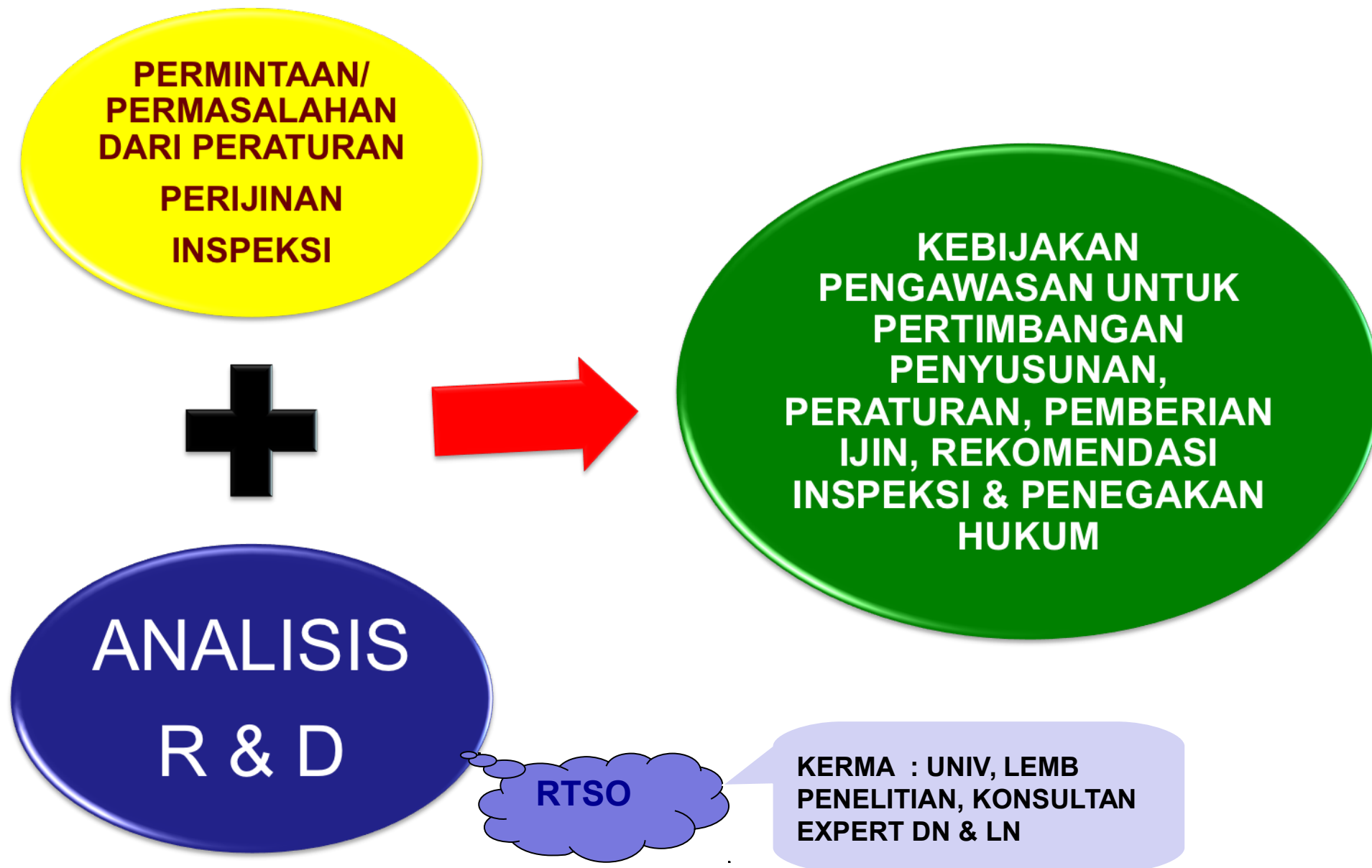
KEMENSOS

MENHUB

NUBIKA

BPBD

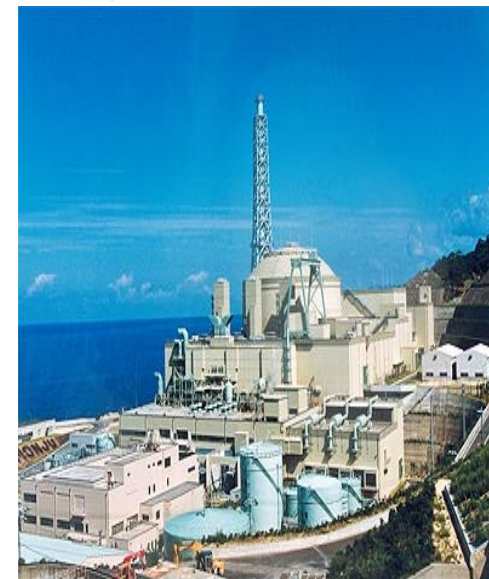
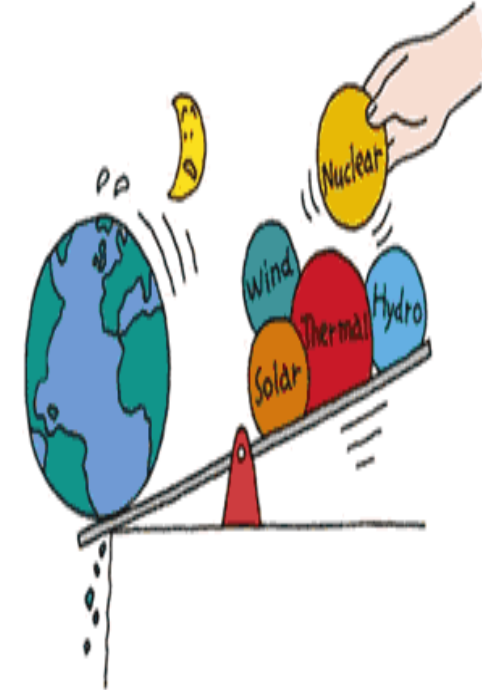
PENGKAJIAN KESELAMATAN & KEAMANAN NUKLIR





TANTANGAN PENGAWASAN PLTN

1. BATAN merencanakan membangun Reaktor Daya Eksperimental atau Reaktor Daya Non Komersial (RDNK) tipe HTGR.
2. ESDM menyiapkan penerbitan Buku Putih PLTN 5000 MW
3. Daerah sudah menunjukkan minatnya membangun PLTN (BATAM, BANGKA, KALBAR)
4. Perkembangan Teknologi PLTN dan standar keselamatan PLTN yang tinggi
5. Dana pengawasan PLTN baru dimulai untuk penyusunan peraturan PLTN komersial tipe LWR, mengikuti arah kebijakan nasional teknologi PLTN yg diterbitkan BATAN. BAPETEN belum menyiapkan sumberdaya pengawasan RDNK tipe HTGR
6. Fasilitas & peralatan BAPETEN untuk Regulatory Technical Support organization TSO, untuk mendukung penilaian teknis keselamatan PLTN perlu diperkuat
7. Kualitas dan kuantitas SDM Pengawas PLTN masih perlu ditingkatkan





ARAH KEBIJAKAN UTK PERENCANAAN PENGAWASAN PLTN 2015-2019

- Penguatan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan sinkronisasi pengawasan pembangunan PLTN yang optimal (penyusunan peraturan terkait, pelaksanaan perijinan dan inspeksi)
- Penguatan kompetensi SDM dalam pengawasan PLTN khususnya teknologi small medium reaktor daya (SMR), peningkatan kerjasama dengan badan pengawas tenaganuklir di LN
- Peningkatan anggaran & pedoman pelaksanaan pengawasan PLTN
- Penguatan pelaksanaan pembinaan tentang pengawasan terhadap pembangunan PLTN
- Penguatan RTSO dengan mengadakan perangkat TSO yang lengkap dan memadai untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih efektif
- Penguatan kepercayaan publik melalui penayangan tentang indikator kinerja keselamatan reaktor daya, sosialisasi dan dengar pendapat publik, pelaksanaan sosialisasi keselamatan reaktor daya dengan menyiapkan program sosialisasi yang terintegrasi.



TAPAK

DESIGN &
KONSTRUKSI

KOMISIONING

OPERASI

Proses & waktu penyelesaian perijinan Reaktor Daya (PLTN , RDNK) bergantung pada beberapa hal sbb:

- Kesiapan dan kecukupan dokumen yang diajukan Pemohon, mengingat persyaratan yang cukup banyak dan rinci;
- Maturity dari teknologi yang dipilih, karena akan menentukan proses review desain (masalah proven technology);
- Pengawasan oleh Pemohon apakah desain rinci sudah sesuai URD;
- Pengawasan oleh Pemohon dan BAPETEN atas mutu produk pada saat reaktor & safety systems diproduksi;
- Harus ada izin lingkungan dari KLH sbg syarat izin konstruksi dari BAPETEN; dan juga izin bangunan dari PU
- Proses konstruksi dan pengawasannya, dll.;
- Ketersediaan dan kinerja tenaga ahli (TSO) yang akan membantu BAPETEN.



KESIAPAN BAPETEN MELAKUKAN PENGAWASAN PLTN

TEKNOLOGI PLTN	PERATURAN NUKLIR 3S	SDM	SISTEM PERIJINAN	SISTEM INSPEKSI	SARANA
PWR	<ul style="list-style-type: none">- TAPAK (T)- DESIGN (D)- KONSTRUKSI (K)- Komisioning (Ko)- OPERASI (O)	T,D,K, Ko,O PERLU KERMA DG PAKAR (ExTSO)	Pedoman/SOP perijinan T,D, K	Pedoman/SO P inspeksi T,	PERLU LAB KOMPUTASI KESELAMATA N NUKLIR , dan penguatan internal TSO
BWR	<ul style="list-style-type: none">- TAPAK- DESIGN- KONSTRUKSI- Komisioning- OPERASI	SDA	SDA	SDA	SDA
PHWR	<ul style="list-style-type: none">- TAPAK- LAINNYA BELUM SIAP	BS	BS	BS	SDA
HTGR	<ul style="list-style-type: none">- TAPAK- LAINNYA BELUM SIAP	BS	BS	BS	SDA

KETERANGAN :

BS : BELUM SIAP, PERLU PERCEPATAN PROGRAM & ANGGARAN

SDA : SAMA DG ATAS

PERAN & PRESTASI BAPETEN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN NUKLIR DUNIA

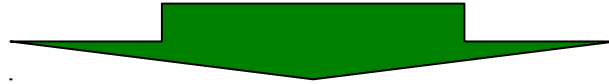
- Pemrakarsa Asia Pacific Safeguards Network (APSN), dan Asian Nuclear Safety Network (ANSN).
- Anggota Tim Fact Finding Mission Kecelakaan Nuklir Fukushima
- National Contact Point for Convention on Nuclear Safety (CNS), vice president Review Meeting IV – CNS
- National Contact Point for Convention on Early Notification of Nuclear Accident dan Convention on Assistance In The Case of A Nuclear Accident or Radiological Emergency.
- National Contact Point for joint convention on the safety of fuel Management and The safety of Spent Fuel Management.
- National Contact Point for Convention on Physical Protection of Nuclear Material
- Hasil Penilaian IAEA – RASIM, Infrastruktur Pengawasan Nuklir BAPETEN terbaik ke 8 di Asia Pasifik.
- Aktif dalam ASEANTOM, Forum Badan pengawas Nuklir ASEAN

Nawacita – 2 :

Kami tidak akan pernah absen utk membuat tata kelola pemerintah yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

VISI BAPETEN :

Menjadi Badan Pengawas Ketenaganukliran Kelas Dunia



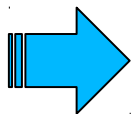
NILAI – NILAI BAPETEN :

Mandiri, Integritas, Transparan, Profesional, Pelayanan Prima.



TATA – KELOLA PEMERINTAH :

Bersih, Efektif & Akuntabel, Demokratis dan Terpercaya.



**Percepatan Program Reformasi Birokrasi, Sinergi dg
Penerapan Sistem Manajemen BAPETEN yang Efektif**

PENATAAN TATA LAKSANA
AKSEL PENERAPAN E-GOV
PENGUATAN KIP / HUMAS /
KERMA
PENERAPAN MNJMN ASN / SF-1 /
TEC.DOC 1254 /GSR part 2

Terwujudnya
Pemerintahan
yang Transparan,
Efektif, dan Efisien

Penyelarasan Prog RB & SMB.
Rpjmn/Renstra/ RKT / Monev /
LAKIP / LKN / Rewards &
Punishment/ Tata kelola.
Leadership / DIKLAT & KM
Efisiensi belanja aparatur

Terwujudnya
Pemerintahan
yang Bersih dan
Akuntabel

Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

SISTEM INTEGRITAS
KODE ETIK&PERILAKU
LHKPN & GRATIFIKASI
PENGAWASAN
INTERN/APIP /E-AUDIT /
E-PROC /
E-CATALOG / SAKIP /
PENGADAAN SDM

SASARAN
REFORMASI
BIROKRASI
2015 - 2019

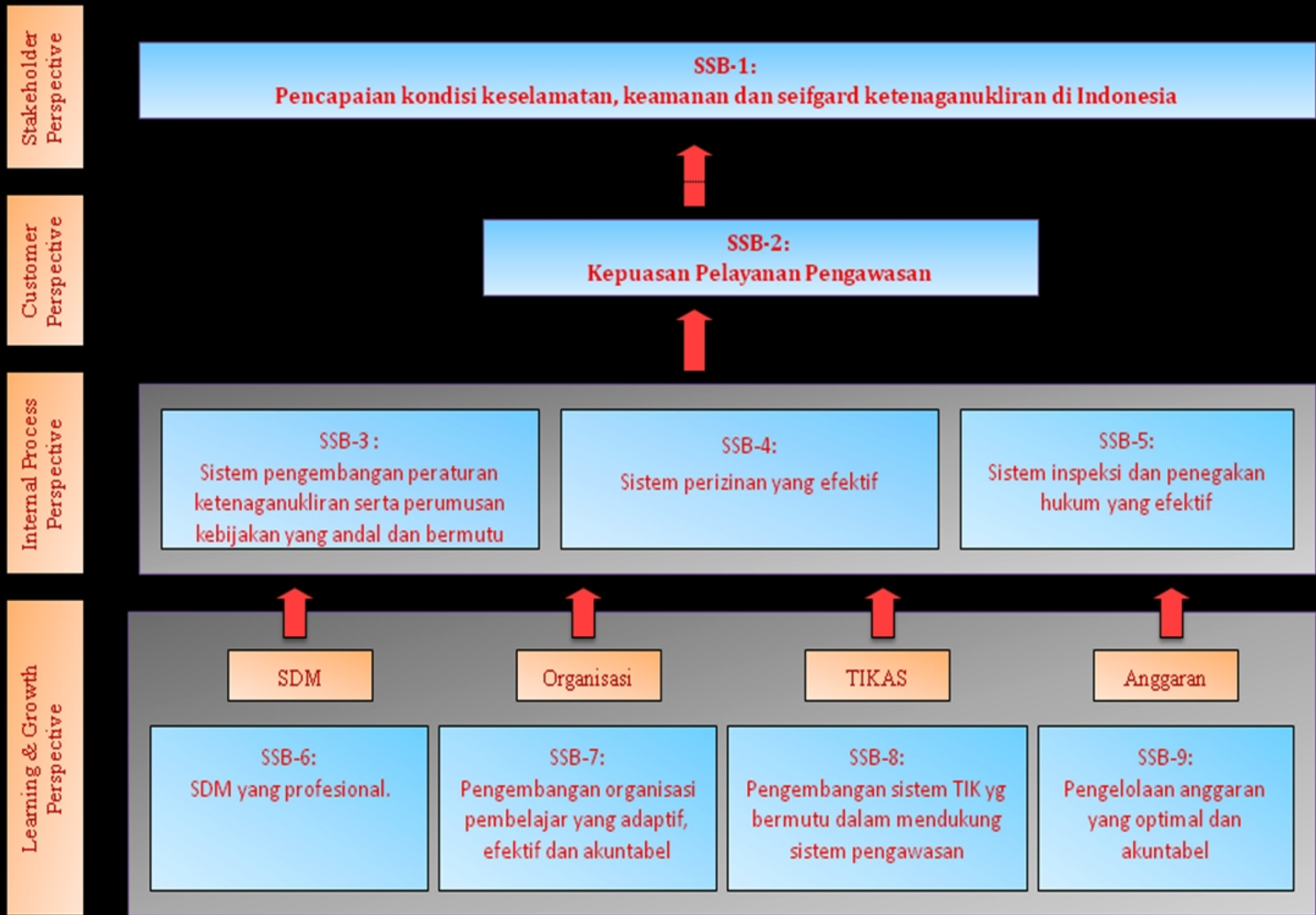
Penguatan kelembagaan/
Organiasi
Penguatan pengndalian
kinerja

PERIZINAN
Penerapan IC
PELAYANAN UMUM



Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, ketenteraman pekerja, masyarakat & lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Pencapaian kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaganukliran di Indonesia2. Kepuasan Pelayanan Pengawasan Ketenaganukliran
Meningkatkan kualitas pengawasan ketenaganukliran (peraturan, perizinan dan inspeksi) yang sesuai dengan Standar Internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan peraturan ketenaganukliran serta perumusan kebijakan yang andal dan bermutu2. Sistem perizinan yang efektif3. Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif
Mewujudkan tata kelola pengawasan ketenaganukliran yang bersih, efektif, akuntabel, terpercaya.	<ol style="list-style-type: none">1. SDM yang profesional2. Pengembangan organisasi pembelajar yang adaptif, efektif dan akuntabel3. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bermutu dalam mendukung sistem pengawasan4. Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Visi : Menjadi Badan Pengawas Ketenaganukliran Kelas Dunia



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Angka Kejadian Nuklir /INES
2. Tingkat dosis radiasi pekerja di bawah NBD
3. Tingkat Kepatuhan Pengguna Terhadap Peraturan Ketenaganukliran yang Berlaku
4. Indeks Kepuasan Pengguna
5. Persentase penerapan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran
6. Persentase hasil kajian yang diterapkan dalam pengawasan
7. Jumlah hasil rumusan kebijakan yang diterapkan dalam pengawasan
8. Persentase ketersediaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.
9. Persentase Fasilitas yang memenuhi Persyaratan Perizinan
10. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti
11. Persentase tindak lanjut penegakan hukum
12. Persentase pelabuhan dan perbatasan yang menerapkan sistem deteksi keamanan nuklir
13. Persentase daerah yang memahami pengawasan Pemanfaatan Barang Dual Use
14. Persentase daerah yang menerapkan pengelolaan TENORM
15. Persentase daerah yang telah menerapkan program kesiapsiagaan nuklir
16. Jumlah wilayah yang dipantau radioaktivitas lingkungannya
17. Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
18. Hasil Penilaian LAKIP lembaga
19. Hasil Penilaian PMPRB
20. Persentase penilaian PKMI Unit Kerja
21. Tingkat integrasi dan ketersediaan (uptime) Layanan TIK
22. Opini BPK atas Laporan Keuangan
23. Capaian Realisasi Anggaran



- 1. Penguatan pengawasan thdp aspek penuaan Instalasi Nuklir BATAN & BANTEK.**
- 2. Persiapan Pengawasan PLTN dan Reaktor Baru**

- 3. Peningkatan Kualitas & Frekuensi Pengawasan Fasilitas Kesehatan/ Industri**
- 4. Penegakan Hukum**

KEBIJAKAN STRATEGIS

- 5. Peningkatan Koordinasi dalam Membangun Keamanan Nuklir dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional melalui I-CoNSEP**

- 6. Penguatan & Percepatan Program Reformasi Birokrasi**
- 7. Peningkatan infrastruktur & Peralatan pengawasan Ketenaganukliran**



- 1. ORGANISASI : Reorganisasi**
- 2. TATA LAKSANA : E-GOV**
- 3. PERATURAN : REGULASI YG LENGKAP & TIDAK TUMPANG TINDIH.**
- 4. SDM : PENGADAAN SDM, LEADERSHIP; DIKLAT & KM; PENERAPAN MANJMN ASN**
- 5. PENGAWASAN : APIP; E-AUDIT ; LHKPN ; GRATIFIKASI; SYSTEM INTEGRITAS.**
- 6. AKUNTABILITAS : SPIP, SAKIP**
- 7. PELAYANAN PUBLIK : KIP, PERIJINAN**
- 8. MANAJEMEN PERUBAHAN**

KEPALA

KOMISI AHLI

**SEKRETARIS
UTAMA**

**BIRO
PERENCANAAN**

**BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

BIRO UMUM

**BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN**

**DEPUTI BIDANG
PERIZINAN DAN INSPEKSI**

**DIREKTORAT PERIZINAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT
RADIOAKTIF**

**DIREKTORAT PERIZINAN
INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR**

**DIREKTORAT INSPEKSI FASILITAS
RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

**DIREKTORAT INSPEKSI
INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR**

**DIREKTORAT KETEKNIKAN DAN
KESIAPSIAGAAN NUKLIR**

**DEPUTI BIDANG
PENGKAJIAN
KESELAMATAN NUKLIR**

**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM
DAN TEKNOLOGI FASILITAS
RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM
DAN TEKNOLOGI INSTALASI DAN
BAHAN NUKLIR**

**DIREKTORAT PENGATURAN
PENGAWASAN FASILITAS
RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

**DIREKTORAT PENGATURAN
PENGAWASAN INSTALASI DAN
BAHAN NUKLIR**

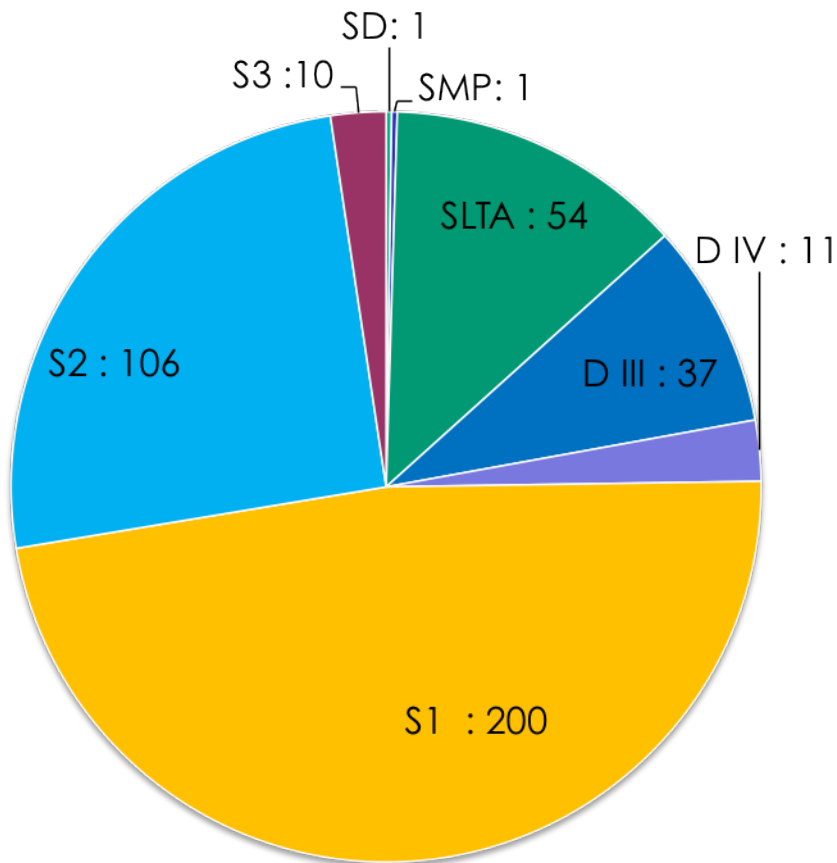
INSPEKTORAT

SEGERA REORGANISASI



SDM BAPETEN

DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN



INFRASTRUKTUR / SARANA BAPETEN



GEDUNG PERKANTORAN, MENEMPATI GEDUNG
SEKRETARIAT NEGARA
DI JLN GAJAH MADA No.8 JAKARTA



GEDUNG BALAI PENDIDIKAN & PELATIHAN DI
CISARUA – PUNCAK



PUSAT KENDALI KEDARURATAN NUKLIR NASIONAL.



LAB. SAFEGUARDS, LAB PROTEKSI RADIASI DAN
MONITORING RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN, LAB
KOMPUTASI NUKLIR.



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency



TERIMA KASIH